



GERAKAN HIZBUT TAHRIR DAN RAELITAS POLITIK ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Jonkennedi

Dosen Tetap Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto

Abstract

In Post-New Order, the process of democratization is not only marked by the emergence of new political parties and the blooming of civil society groups, but also groups that identify themselves as part of a religious movement. Islam in particular explicitly identifies the community groups that are manifest at the same time positioning it as the basis for the orientation of the movement and its struggle.

The emergence of groups affiliated with Islam restored the old debate being a controversy for a long time. The issue is what the most representative formulation of Islam and state is. There are 2 (two) major currents in this discourse which are then plotted on a group of formalists and substantialists. Formalist groups have an interest in linking Islam and the state legally and formally, whereas substantialist groups emphasize on the substantial meaning of Islam in the state.

This paper will discuss a pattern of Islam formalist movement in the political realities of contemporary Indonesia. The democratization process enables the various civil society groups to express their aspirations through the organizing group. One of the aspirations that are organized as part of civil society is a political movement. Formal political institutions in the development of democracy continue to decline or deficit. Other forms of political organizing on the one hand can be interpreted as a deepening of democracy or of deliberation, but on the other hand, it can be interpreted as an expression of dissatisfaction to the formal political representation.

Keywords: Islam, the Islamic movement, politics, formalist, substantialist.

Abstrak

Pasca Orde Baru, proses demokratisasi tidak hanya ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru dan menjamurnya kelompok masyarakat sipil, tetapi juga kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan keagamaan. Islam terutama secara eksplisit menjadi identitas bagi kelompok masyarakat yang secara manifest memosisikannya sebagai basis sekaligus orientasi gerakan dan perjuangannya.

Secara argumentatif, kemunculan kelompok yang berafiliasi dengan Islam mengembalikan perdebatan lama yang sejak awalnya menjadi kontroversi. Persoalan bagaimana rumusan yang paling representatif antara Islam dan negara. Terdapat 2 (dua) arus besar dalam wacana ini yang kemudian terpolakan pada menjadi kelompok yang formalis dan substansialis. Kelompok formalis berkepentingan mengaitkan Islam dan negara secara legal formal, sedang kelompok substansialis lebih mengedepankan substansi Islam dalam negara.

Tulisan ini akan menguraikan salah satu pola gerakan Islam formalis dalam realitas politik Indonesia kekinian. Proses demokratisasi memungkinkan berbagai kelompok masyarakat sipil mengekspresikan aspirasinya melalui pengorganisasian kelompok. Salah satu aspirasi yang diorganisasikan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil adalah politik. Pelembagaan politik formal dalam perkembangan demokrasi terus mengalami



penurunan atau defisit. Pengorganisasian politik dalam bentuk lain pada satu sisi bisa dimaknai sebagai pendalaman demokrasi atau deliberasi, disisi lain bisa dimaknai sebagai ekspresi ketidakpuasan atas representasi politik formal.

Kata-Kata Kunci: Islam, gerakan Islam, Politik, Formalis, Substansialis.

Pendahuluan

Dalam sejarah bangsa telah berdiri berbagai kekuatan Islam dan organisasi sosial keagamaan di kalangan umat Islam. Setidaknya dapat disebutkan seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Wasliyah, PUI, dan sebagainya. Dewasa ini yang paling banyak mewarnai perkembangan politik nasional secara umum adalah Muhammadiyah dan NU. Setelah jatuhnya Orde Baru telah bermunculan berbagai gerakan Islam yang mengembangkan isu, wacana dan program aksi sosial politik dalam atmosfir kebebasan berekspresi. Artinya berbagai pihak merasa perlu untuk mendesak demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik, atas persoalan-persoalan domestik bangsa yang berkaitan dengan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Sistem politik harus demokratis dan pemerintahan harus lebih terbuka, bertanggung jawab dan berpijak pada kepentingan publik yang luas. Item-item ini menjadi isu utama dalam perpolitikan bangsa. Meski demikian, harapan akan pemerintah yang terbentuk secara demokratis untuk menyelesaikan seluruh agenda reformasi yang telah digagas dan dirumuskan oleh kalangan mahasiswa sejak 1998 dan berbagai isu yang berkenaan dengan perangkat hukum yang mampu menjamin kelangsungan hidup politik bangsa yang demokratis di masa depan menjadi isu yang aktual. Di tengah kontroversi kekuasaan dan sikap pemerintah mengenai arah masa depan bangsa kalangan Islam politik juga melakukan konsolidasi internal meski dari satu elite Islam dengan elite Islam lainnya memiliki sikap dan pandangan politik yang berbeda, antara satu kelompok sosial keagamaan Islam dengan kelompok Islam yang lain berbeda dalam merespons perubahan yang terjadi, tapi sikap aktif dalam menyikapi perubahan patut didukung.

Respons yang diberikan oleh kalangan Islam bentuknya beragam sesuai dengan kadar kepentingan dan harapan yang diinginkannya. Pada dasarnya, respons kalangan Islam atas perubahan politik tidak berbeda jauh dengan respons kalangan non-Islam atau nasionalis. Cara dari masing-masing kelompok politik ini ber-beda dalam mengekspresikan sikap dan pendirian politiknya.

Keragaman sikap politik umat Islam Indonesia yang terjadi pasca kejatuhan rezim Orde Baru terkait dengan sejumlah hal yang menyertai sikap politik, misalnya seorang elite akan lebih senang terlibat dalam partai politik yang tidak mengatasnamakan agama daripada partai agama. Tetapi ada juga yang berkeyakinan bahwa Islam dalam doktrinnya sangat menekankan perjuangan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan untuk perjuangan tersebut harus digunakan "baju" Islam. Karena itu pilihan politiknya pun adalah partai agama (Islam). Meskipun muncul perbedaan pada bentuk "kendaraan" politik untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, tetapi substansi perjuangan yang tampak sebagai manifestasi dari sikap tersebut adalah mendorong perubahan politik ini dengan baik agar pemerintahan menjalankan kekuasaannya dengan penuh kejujuran, keadilan, dan amanah.

Selain bentuk perjuangan dengan menggunakan "baju" politik Islam, kalangan Islam juga muncul sebagai gerakan sosial keagamaan yang mempunyai bentuk perjuangan yang khas dari masing-masing ormas yang ada. Di luar Muhammadiyah dan NU, muncul gerakan Islam baru sebagai akibat lain dari kejatuhan rezim Orde Baru. Gerakan-gerakan



baru tersebut memiliki bentuk perjuangan yang oleh sebagian kalangan dimasukkan ke dalam bentuk perjuangan militan, radikal, dan fundamentalis.

Dinamika politik global dalam polanya yang hegemonik yang diperankan oleh Barat memunculkan respons tuntutan kalangan Islam Indonesia terhadap kehidupan politik nasional yang mencerminkan nilai-nilai moral agama. Tuntutan semacam ini menyeruak sebagai agenda besar kalangan Islam Indonesia, baik yang berprofesi sebagai politisi di partai politik maupun yang berprofesi sebagai kelompok Islam yang tergabung dalam sayap *civil society*. Mereka menghendaki satu hal, bahwa proses politik di negara yang berpenduduk muslim terbesar ini haruslah menjiwai spirit kejujuran, moralitas dan amanah.

Hal tersebut yang akan dibicarakan dalam bagian ini, terutama fenomena kehadiran organisasi atau laskar Islam pasca kejatuhan Orde Baru, seperti munculnya Hizbut Tahrir (HTI). Fenomena ini menarik untuk diketengahkan dalam tulisan ini karena memiliki cara yang khas dalam menyuarakan aspirasi politik keislaman mereka kepada publik.

Hizbut Tahrir Tahrir

Barangkali gerakan Islam Indonesia saat ini yang paling fokus memperjuangkan terwujudnya khilafah Islamiyah di Indonesia dan di belahan dunia mana pun adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik (partai). Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa/ inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.¹

Sejak awal berdirinya tahun 1953 di Al-Quds Palestina, organisasi ini memiliki cita-cita besar, yakni melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, Hizbut Tahrir berpendirian harus dilakukan melalui negara, dalam hal ini Hizbut Tahrir menekankan pada Daulah Islamiyah atau daulah khilafah yang dipiipin oleh seorang khilafah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Khilafah tersebut harus dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.² Kemajuan umat Islam harus diraih dengan pencerahan dan pencerdasan. Karena itu Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan kemuliaan dulu.

Gagasan Hizbut Tahrir Tahrir

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, membebaskan umat dari pemikiran-pemikiran dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara sekuler. Negara-negara di dunia, termasuk Islam, tengah mempraktikkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menurut pandangan Hizbut Tahrir sudah jauh dari misi Islam. Artinya negara-negara muslim sudah banyak meniru pola kehidupan masyarakat Barat yang tidak



Islami dan mengadopsi sistem hukum yang tidak bersumber dari Islam. Kondisi semacam inilah yang menurut Hizbut Tahrir harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan sistem hukum Islam dan menentang segala bentuk perundang-undangan serta pikiran-pikiran yang kafir.

Dengan menolak segala macam hegemoni Barat, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang hanya berasal dari Islam.³

Segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam bukan merupakan bagian dari setiap sikap dan pandangan Hizbut Tahrir. Seluruh gagasan yang muncul dari Hizbut Tahrir hanya bersumber dari Islam, sesuatu yang tidak Islami pasti tidak laku dan tidak menjadi pedoman dalam Hizbut Tahrir. Pendirian Hizbut Tahrir yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah, yakni kepemimpinan tunggal umat Islam, setelah khilafah Islamiyah di Turki Ustmani dihancurkan oleh kekuatan kapitalisme Barat.

Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, Hizbut Tahrir menempuh cara-cara politik dan tidak dengan cara-cara yang lain. Cara politik efektif untuk mencapai tujuan terbentuknya khilafah Islamiyah. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Tugas tersebut merupakan kewajiban setiap muslimin baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana kewajiban yang sama telah dilaksanakan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Tugas tersebut juga merupakan tugas bersama kaum muslimin di seluruh dunia.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara, bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia. Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam. Al-Qur'ani telah menegaskan dalam QS. an-Nisa (4): 59 "Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin di antara kalian). Dan mengenai penegakan hukum, QS. al-Maidah (5): 48 memberi pedoman untuk memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan. Ayat ini telah jelas mengenai ketentuan Islam tentang pemerintahan dan proses penyelenggaraannya.

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tablig akbar dan demonstrasi. 2 hal ini merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai politik untuk saat ini di Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstra parlemen. Kelembagaan politik Indonesia menurutnya menyulitkan sekaligus tidak efektif bagi Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan khilafah Islamiyah, bahkan muncul "ketakutan" akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam di masa depan.

Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat ekstra parlemen dengan menggelar seminar dialog, diskusi, tablig akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Gerakan ini tidak bersifat lokal tetapi menyebar ke seluruh belahan dunia. Pendiri jama'ah Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan beberapa konsep pemerintahan Islam yang oleh pengikutnya akan terus diperjuangkan hingga terealisasi. Hizbut Tahrir Indonesia masih memprioritaskan pembinaan jama'ah,



menurut salah seorang yang aktif dalam Hizbut Tahrir, suatu saat Hizbut Tahrir Indonesia akan menjadi kekuatan politik resmi untuk dapat memperjuangkan cita-cita politiknya.

Hizbut Tahrir merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji, mengingat gagasan dan praksisnya berbeda dengan kebanyakan jama'ah lain yang pernah ada di Indonesia. Disebut demikian, karena agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh jama'ah ini berdasarkan tradisi Islam periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, khulafaur Rasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyah dan Abbasiyah hingga khilafah Turki Ustmani yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 1924. Jama'ah ini meletakkan dasar perjuangan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi seperti juga jama'ah-jama'ah Islam lainnya. Untuk membangkitkan, menyadarkan, mendidik umat serta menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, Hizbut Tahrir harus merujuk sepenuhnya kepada Qur'an dan Sunnah, apalagi untuk memperjuangkan terbentuknya daulah Islamiyah.

Bagi Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan Islam merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena Nabi telah berhasil menegakkan Islam dan memperluas pengaruhnya selama lebih kurang sepuluh tahun di Madinah dan pada masa itu umat Islam telah banyak dan wilayah kekuasaan Nabi yang berpusat di Madinah⁴ telah meluas dan hampir mencakup seluruh jazirah Arabia. Bangunan Kota Madinah dilandasi oleh tiga pilar yaitu pemikiran (*fikriyah*), politik (*siyasiyah*) dan tanpa kekerasan (*la maadiyah*).⁵ Keberhasilan Rasulullah membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah merupakan representasi konkret betapa Islam dapat memberikan alternatif yang paling aman, damai bagi seluruh umat manusia.

Upaya Sistematis Membangun Masyarakat Islami

Hizbut Tahrir melakukan berbagai upaya yang sistematis bagi terlaksananya sebuah kehidupan masyarakat yang lebih Islami, dan upaya tersebut akan tercapai bila didukung oleh sumber daya manusia yang Islami dan memahami arah perjuangan Islam secara baik. Karena itu dibutuhkan metode atau cara yang lebih baik dalam mencapai target dan tujuan Hizbut Tahrir. Dengan cara seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para ulil amri sebelumnya yang menekankan pada pembinaan dan pengaderan akan memperoleh hasil yang diinginkan meski tidak bersifat instan.

Hizbut Tahrir dalam rangka mengoperasionalkan gagasan idealnya menggunakan tiga tahap;⁶

1. Tahapan *tsaqif* (pembinaan dan pengaderan) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai.
2. Tahapan *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan.
3. Tahapan *Istilamiil Hukmi* (pengambilalihan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia.

Ketiga tahap tersebut di atas berjalan secara simultan dan gradual. Artinya tahapan pertama mendekati umat dengan memberikan pemahaman Islam yang benar menurut pandangan, pikiran dan keyakinan ideologis Hizbut Tahrir sehingga dengan memberikan pencerahan spiritual melalui pemahaman Islam yang benar ini, Hizbut Tahrir mengharapkan masyarakat tertarik dengan gerakan Hizbut Tahrir dan masuk menjadi anggota untuk memperkuat barisan gerakan Hizbut Tahrir. Pada intinya tahapan ini merupakan tahapan pembentukan ideologi dan penanaman Tauhid yang benar kepada setiap individu yang merasa tertarik dengan berbagai pandangan dan pikiran Hizbut Tahrir.



Apabila seseorang telah memahami ajaran Islam berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw maka sudah cukup bagi Hizbut Tahrir. Hal ini karena dengan pemahaman demikian akan muncul kesadaran untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Makna dari pengaderan dan pembinaan anggota dalam Hizbut Tahrir adalah pembentukan karakter dan kepribadian setiap individu muslim yang merasa berkepentingan dengan ajaran atau risalah Islam yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad saw. Dalam pola pembentukan kader Hizbut Tahrir lebih banyak memberikan perhatian kepada generasi muda yang menjadi pelanjut perjuangan dan penegakan syari'at Islam dan aqidah Islamiyah. Setelah masa pembentukan kader sudah mantap dan telah memiliki komitmen untuk berjihad menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka tahapan berikutnya yakni berinteraksi dan membangun jaringan dengan berbagai kelompok Islam lainnya yang tentu mempunyai gagasan yang sama mengenai pentingnya umat Islam menegakkan syari'at Islam. Kekuatan Islam akan tampak ketika ada persatuan dan kesamaan pandangan dalam merumuskan agenda perjuangan umat. Berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam masyarakat, bagi Hizbut Tahrir merupakan sesuatu yang tidak saja penting tetapi merupakan keharusan bagi proses sosialisasi ajaran Islam sehingga masyarakat dapat hidup dan menerima ajaran Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Interaksi yang perlu dibangun dalam kerangka penyadaran melalui opini dan penggalangan kekuatan massa merupakan cara yang baik untuk dilakukan, karena masyarakat Muslim berada dalam bayang-bayang pengaruh dan dominasi kapitalisme – sosialisme di mana keduanya merupakan produk ideologi Barat. Kalangan Barat sedang menyebarkan peperangan terhadap kaum muslimin di belahan dunia, setelah berhasil menghancurkan Afganistan, kemudian Irak dan akan menyusul negara-negara muslim lainnya. Agresi dilakukan untuk memperbesar pengaruh dan dominasinya terhadap negara-negara kecil, terutama negara-negara Islam yang mempunyai kekayaan alam melimpah. Pemimpin umat Islam harus membangun jaringan dan kekuatan untuk menyatukan potensi umat melawan hegemoni Barat dengan cara-cara yang rasional.

Tahapan yang paling penting bagi Hizbut Tahrir untuk memudahkan pelaksanaan syari'at Islam adalah *Istilamiil Hukmi* (pengambilalihan kekuasaan). Tingkat terakhir ini merupakan fase di mana perjuangan umat Islam sudah mencapai target yang diinginkannya, karena bagi Hizbut Tahrir ketika mencapai tingkatan ini, maka umat Islam akan dengan leluasa mengatur kehidupan umat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bagi Hizbut Tahrir, tahapan ini merupakan proses perjuangan yang dibantu dan diberi pertolongan oleh Allah. Setelah khilafah terbentuk, maka kaum muslimin sudah mulai mensosialisasikan ide-ide, pandangan dan konsep-konsepnya berdasarkan ajaran Islam. Membangun kejayaan umat menurut pendapat Hizbut Tahrir harus berada dalam satu payung politik yakni di bawah naungan Daulah Islam, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibi'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.⁷

Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Indonesia

Realitas politik global menunjukkan bahwa hegemoni negara-negara kapitalis dalam dunia ekonomi dan politik sangat kuat. Menurut Hizbut Tahrir, posisi dominasi harus diakhiri dengan memberikan pendidikan politik kepada umat tentang bagaimana Islam memberikan jalan keluar bagi persoalan kontemporer. Karena itu perjuangan



menegakkan syari'at Islam harus dilakukan dengan memasuki arena politik resmi dan aktivitas dunia keilmuan. Hizbut Tahrir akan melakukan kritik dan kontrol terhadap ketimpangan pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Penjelasan di atas dapat digunakan untuk melihat potret kehadiran Hizbut Tahrir sebagai fenomena baru dalam sejarah perpolitikan dunia dan terutama kehadiran Hizbut Tahrir di Indonesia dengan isu-isu mengenai khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Gagasan ideal, simpati dan spektakuler yang diusung oleh Hizbut Tahrir, walaupun gagasan itu pada dasarnya merupakan gagasan lama yang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin dan khilafah-khilafah setelahnya tetapi untuk konteks politik global saat ini merupakan ide yang sedikit mengundang "kekhawatiran" dan "pesimisme". Hal ini karena dalam realitas kehidupan politik umat masih sulit untuk menghadirkan wacana politik Islam.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi hingga kini masih sulit untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukumnya. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya umat Islam yang juga memiliki pandangan bahwa Islam tidak perlu diatur atau mengatur negara, biarkanlah urusan agama menjadi urusan pribadi dan kelompok keagamaan yang akan membinanya, sementara negara cukup mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Kekuatan asing yang berkolaborasi dengan kelompok dalam negeri tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa besar, bangsa yang kuat, apalagi letak kekuatannya pada umat Islam. Kalau Islam berhasil diwujudkan dalam politik resmi kenegaraan, akan menjadi ancaman bagi pihak asing yang punya rencana untuk mengeksploitasi sumber daya alam negeri yang kaya ini dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai market expansion produk-produk kapitalisine Barat.

Gagasan Hizbut Tahrir mengenai khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah, meskipun masih jauh dari harapan, tetapi bermanfaat bagi pendidikan politik umat Islam. Menurut hemat penulis dalam kurun waktu lima atau satu dekade mendatang, umat Islam masih sulit menyatukan visi dan pandangan mengenai kehidupan sosial dan politik. Isu syari'at Islam yang diperjuangkan oleh partai-partai Islam dalam sidang tahunan 2000, 2001, 2002, dan 2003 sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan politik nasional. Dari luar parlemen Hizbut Tahrir, KAMMI, FPI, LJ, MMI, Lembaga Dakwah Kampus, Majelis Ta'lim, HAMMAS (Hiinpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus), Dewan Dakwah Islamiyah, kelompok-kelompok Islam lainnya di luar NU dan Muhammadiyah menekan MPR untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 tentang kehidupan umat beragama dan memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen tersebut, namun tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang baik dari partai-partai yang mempunyai suara signifikan dalam parlemen, jadi keadaan ini salah siapa? Kembali kepada umat Islam, karena merekalah yang memilih wakil-wakil rakyat yang tidak mau menyam-paikan aspirasi politik mereka.

Langkah yang paling bijak menurut Syafii Maarif dalam kondisi politik demikian adalah penyadaran umat, ungkapan Syafii ini merupakan responsnya terhadap fenomena politik dalam sidang Tahunan MPR tahun 2000, di mana kekuatan-kekuatan Islam secara tegas mengusung tema pokok yaitu memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. Menurut Syafii, apabila umat sudah sadar mengenai kewajibannya terhadap Islam, maka syari'at Islam akan berjalan dengan sendirinya, karena umat Islam telah tercerahkan dalam soal syariat. Barangkali buat Hizbut Tahrir Indonesia langkah bijak, arif, dan baik kalau mengedepankan fungsi penyadaran umat dan pembinaan sebagaimana yang juga



dipahami oleh Hizbut Tahrir dilakukan secara serius dan terencana dengan baik. Penyadaran ini merupakan sesuatu yang penting bagi proses perwujudan misi Islam yaitu tegakkan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam kaitan dengan hukum dan peraturan penyelenggaraan negara, Hizbut Tahrir tetap konsistensi pada aturan Allah dan Sunnah Nabi dan tidak akan mengikuti yang di luar itu. Pandangan Hizbut Tahrir mengenai undang-undang suatu negara, dan pandangan ini merupakan pandangan pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani sebagaimana dikatakannya: "Seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan telah memiliki kekuatan yang mengikat rakyat dan mengatur hubungan antara mereka".⁸

Setiap pemerintahan memiliki konstitusi negara dan konstitusi itu menurut Hizbut Tahrir merupakan produk akal pikiran umat manusia yang serba terbatas dan tidak berdasarkan kepada wahyu Allah yang menjadi pemilik atas bumi ini. Berikut pandangan An-Nabhani mengenai konstitusi: "Undang-undang tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintahan atau undang-undang yang mengatur kekuasaan negara atau badan-badan pemerintahan atau undang-undang yang mengatur kekuasaan negara atau badan-badan pemerintah, menentukan hubungan hak, dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak, dan kewajiban rakyat terhadap negara".⁹

Perangkat hukum setiap negara bersumber pada berbagai bentuk yang dikondisikan dengan perubahan dan kondisi lokal suatu bangsa, ada yang merupakan undang-undang hasil : kerja badan-badan yang dibentuk khusus untuk itu, ada yang bersumber dari adat istiadat, ada yang merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Perangkat yang ada di Indonesia merupakan hasil dari berbagai paduan seperti agama, adat-istiadat, pendapat ahli hukum, dan nilai-nilai yang menjadi sumber dari keadilan.

Hizbut Tahrir menganggap segala sumber hukum (konstitusi) negara-bangsa modern yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan seperti tersebut di atas, apabila tidak mencerminkan nilai-nilai Islam maka produk hukumnya tidak dapat diterapkan. Kaum muslimin tidak boleh menetapkan aturan hukum yang tidak ada pijakannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, karena sistem hukum dalam negara yang demokratis bagaimanapun kalau tidak berdasarkan aturan Allah juga tidak dapat disebut sebagai bentuk pemerintahan yang baik. Islam harus menjadi dasar utama bagi pelaksanaan pemerintahan dan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan

Paradigma gerakan Hizbut Tahrir yang berorientasi pada perwujudan Islam dalam pengertian yang formalistik berpotensi menimbulkan persoalan serius. Salah satu strategi utama perwujudan cita-cita politik adalah melalui *Istilamil Hukmi* (pengambilalihan kekuasaan) yang menekankan pada aksi-aksi progresif menguasai kekuasaan politik suatu negara. Bagi Hizbut Tahrir, Islam tidak akan tegak dalam suatu negara tanpa ada dukungan secara formal dari negara tersebut. Apabila negara belum secara formal mempraktikkan syari'at Islam, maka menguasai negara menjadi hal yang mutlak.

Dalam konteks Indonesia, gerakan Hizbut Tahrir berpeluang besar menimbulkan gesekan dan konflik yang eskalatif. Heterogenitas suku, agama, dan budaya ditengarai menjadi akar peluang konflik yang muncul. Secara internal umat Islam sendiri terjadi perbedaan mendasar tentang hubungan antara Islam dan negara. Secara umum, di Indonesia terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang secara eksplisit meniscayakan hubungan formal antara Islam dan negara. Bagi kelompok ini, Islam harus diformalisasi melalui kekuasaan negara. Dengan pola ini, negara memiliki kewenangan



penyuluhan untuk menjalankan bahkan memaksakan pelaksanaan syari'at Islam kepada warganya.

Kelompok kedua adalah mereka yang lebih menekankan pada substansi ajaran Islam dalam penyelenggaraan negara. Bagi kelompok ini, formalisasi Islam tidak terlalu penting bahkan tidak perlu. Hal yang diperjuangkan adalah akomodasi prinsip-prinsip syari'at Islam dalam undang-undang dan praktik kenegaraan. Sistem negara apapun tidak menjadi masalah sepanjang prinsip-prinsip Islam terekspresikan dalam kehidupan bernegara.

Persoalan kemudian dua kelompok ini di Indonesia relatif berdiri berhadapan-hadapan. Hizbut Tahrir berada pada kelompok yang berorientasi formalisasi Islam dalam negara yang dalam aksi-akasinya berhadapan langsung dengan kelompok kedua. Proses hadap-hadapan ini kemudian memunculkan idiom baru dalam gerakan politik Islam yaitu formalis-fundamentalis versus substansialis-moderat. Pada tahap yang lebih kompleks, kelompok substansialis-moderat dengan tipikalnya yang *soft* memunculkan varian baru yang bergerak lebih progresif. Kelompok ini yang sering distereotipkan sebagai kelompok liberal. Pada titik inilah, konflik yang cenderung eskalatif terjadi, yaitu antara kelompok fundamentalis dan liberal. Dua kelompok yang sama-sama berposisi ekstrem, kiri dan kanan.

ENDNOTE

¹ <http://www.al-islam.or.id>.

² "Hizbut Tahrir Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, (Depok, Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 20.

³ Ahmad Aru Patria, *Gerakan Hizbut Tahrir Tahrir: Kajian Tentang Ideologi dan Perjuangan Politik dalam Upaya Mendirikan Daulah Islamiyah*, (Yogyakarta: Skripsi UPN, 2003), hlm. 115. Hizbut Tahrir Tahrir, Op.Cit. hlm. 29.

⁴ Selama lebih dari sepuluh tahun (+ 13 tahun) di Mekah Rasulullah Muhammad saw berjuang untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah, namun dakwah tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dengan petunjuk dari Allah SWT, Nabi melakukan perjalanan (hijrah) dengan para sahabat dari Mekah menuju Yastrib (+ 400 KM arah utara Mekah), sebelum sampai di Yastrib Nabi beserta sahabat-Nya disambut oleh putra-putri dengan suara merdu melagukan nyanyian selamat datang:

Thlma' al badru 'alaina - bulan purnama telah menjelma
Min tsamyyaatil wadaa'i - menerima dakwah Islam
Wajaba Syukru 'alaina - dari celah-celah barisan bukit
Maadaaalillahi daa'i - wahai utusan pendarat
kami Aiyuh al mab'uustu fiina - keharusan bersyukur bagi kita
Ji'ta bil Amril muthaa'i - Tuan membawa perintah Ilahi
Sesampainya di Yastrib pada sore hari Jum'at tanggal 16 Ra-biul Awal tahun pertama Hijriyah (20 September 622 M) Nabi per-tama-tama mendirikan Masjid sebagai pusat segala kegiatan termasuk untuk ekonomi, politik dan masalah umat lainnya. Masjid menjadi markas besar untuk urusan pemerintahan yang baru di-proklamkan sekaligus menjadi tempat suci, rumah Allah. Segala dakwah Islam berjalan lancar dan sukses bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Nabi di Mekah. Kota Yastrib diganti namanya menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) dan dari kota inilah Nabi untuk pertama kalinya membuat kesepakatan dengan segala unsur yang heterogen dalam masyarakat untuk bersama-sama membangun masyarakat Madinah.

⁵ Untuk uraian mengenai pola pembinaan umat yang tidak menggunakan kekerasan atau anarkis, silakan periksa Hizbut Tahrir Indonesia, *Dakwah Islam Tanpa Kekerasan* (Indonesia: HTI, 2003) hlm. 3.

⁶ Hizbut Tahrir Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir Tahrir*, (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 57.

⁷ <http://www.al-islam.or.id>.

⁸ Taqiuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Islami*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), hlm. 122.



⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

DAFTAR PUSTAKA

- Patria, Ahmad Aru. 2003. *Gerakan Hizbut Tahrirut Tahrir: Kajian Tentang Ideologi dan Perjuangan Politik Dalam Upaya Mendirikan Daulah Islamiyah*. (Skripsi). Yogyakarta: UPN.
- Hizbut Tahrirut Tahrir Indonesia. 2003. *Dakwah Islam Tanpa Kekerasan*. Jakarta: HTI.
- Hizbut Tahrirut Tahrir. 200. *Mengenal Hizbut Tahrir Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah.
- Hizbut Tahrirut Tahrir. 2000. *Strategi Dakwah Hizbut Tahrirut Tahrir*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah.
- <http://www.al-islam.or.id>.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Peraturan Hidup Islami*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.